

Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan.

Oleh:
Raffles, S.H., M.H.¹

ABSTRACT

The implementation of principles Good Corporate Governance for the bank's internal improvement has been sure of giving the strong fundamentally for the prudential and profesionality. The Implementation of principles Good Corporate Governance will give the possibility of self regulatory that controlling the behavior of management and all of staf according to professional principles, business ethic, accountability, and transparency. The Implementation of principles Good Corporate Governance will be a fundamental aspect for developing of business and institutions will be a fundamental aspect for banking industry.

Keywords : *Good Corporate Governance, Developing, Banking Institutions.*

A. PENDAHULUAN

Dalam lingkungan pemerintahan dan dunia usaha terutama dalam dekade terakhir ini, berkembang istilah dan konsep *good governance*. Istilah dan konsep tersebut berkembang terutama sejak Indonesia dilanda krisis multi dimensi pada tahun 1997. Krisis multi dimensi tersebut membuka kesadaran semua pihak bahwa terjadi ketidakberesan dalam pengelolaan pemerintahan dan dunia usaha, yang ditandai maraknya praktik kolusi, korupsi, nepotisme, persaingan usaha secara curang, praktik monopoli, dan lain-lain, serta membuka mata seluruh elemen bangsa akan pentingnya pengelolaan pemerintahan dan dunia usaha secara baik (*good governance*)

Secara umum, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), hukum dan aturan (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas,

¹ Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi.

akuntabilitas dan visi strategis². Penggunaan prinsip *good governance* dalam dunia usaha disebut *Good Corporate Governance*. Dengan kata lain bahwa dunia usaha harus juga membangun dan memelihara prinsip-prinsip *good governance*³.

Dalam kaitannya dengan dunia usaha, tulisan ini akan membatasi pada sektor perbankan. Pertimbangan mendasar mengapa sektor perbankan atau lembaga perbankan yang menjadi pilihan terutama disebabkan (2) dua alasan, yaitu: *pertama*, bahwa berdasarkan pilar pembangunan ekonomi bangsa, perbankan memegang peran yang sangat strategis, yang sangat mempengaruhi dinamika perekonomian bangsa secara umum. Tentu saja, dengan tidak bermaksud mengabaikan dan menistakan peran kelembagaan ekonomi keuangan lainnya. *Kedua*, dikaitkan dengan krisis multi dimensi yang melanda Bangsa Indonesia sebagaimana disinggung di awal tulisan ini, perbankan merupakan kelembagaan keuangan yang paling banyak mendapat sorotan, terutama terkait dengan aspek pengelolaan bank.

Peran strategis perbankan dalam pembangunan dapat dicermati dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Pembangunan sektor ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, kelarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan,

²Johan Pieris dan Nizam Jim, 2007, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Pelangi Cendikia kerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, Jakarta. Hal. 131.

³*Ibid.* Hal. 134

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan adalah perbankan.

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan dan perbankan memainkan peran yang menentukan dalam kebijakan pengembangan perekonomian bangsa. Oleh karena itu jika dilihat dalam praktik perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong terhadap perkembangan perekonomian bangsa. Sebaliknya kalau lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan⁴.

Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan, bank dan lembaga perbankan memiliki peranan untuk menggerakkan perekonomian dengan meningkatkan eskalasi perputaran dana yang dihimpunnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*.

⁴Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas⁵.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Hal ini juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dengan perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang kompleks, dan sekaligus diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional secara umum, yang meliputi semua sektor dan bidang pembangunan, dalam tiap kurun waktu pelaksanaannya senantiasa menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda, yang menuntut adanya cara dan model penyelesaian yang berbeda pula. Untuk itu, diperlukan suatu pembaharuan guna penyesuaian segenap instrumen dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum, pembaharuan ini ditandainya adanya suatu perubahan-perubahan.

Perubahan sudah merupakan fenomena global yang tidak bisa dibendung. Beberapa kejadian yang dihadapi antara lain adalah restrukturisasi, merger, devistasi dan akuisisi, penurunan kesempatan kerja dan ekspansi internasional dengan segala konsekuensinya. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah cara mengerjakan atau berfikir tentang sesuatu yang dapat menjadi mahal dan sulit⁶

⁵Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi baru), Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 24

⁶Wibowo, 2006, *Manajemen Perubahan*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 86

Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kuatnya dorongan eksternal dan karena adanya kebutuhan internal. Perubahan juga berpeluang menghadapi resistensi, baik individual maupun organisasional. Namun demikian, resistensi bukannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diatasi. Transparansi, komunikasi dan pengikutsertaan semua pihak yang terlibat dengan perubahan akan dapat mengurangi resistensi terhadap adanya perubahan⁷. Tujuan perubahan terencana di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan⁸.

Pembaharuan pengelolaan perbankan juga terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat. Konteks ini tentu saja berkaitan dengan dinamika perkembangan dunia perbankan atau bisnis perbankan. Bisnis perbankan di Indonesia di era tahun 1960-an dan tahun 1970-an merupakan bisnis yang belum begitu terkenal. Kesan bank masih angker, bank tidak perlu mencari nasabah tetapi sebaliknya nasabahlah yang datang mencari bank. Kemudian di era tahun 1980-an dan tahun 1990-an kesan dunia perbankan menjadi terbalik karena di era ini justru perbankan mulai aktif mencari nasabah. Bahkan dengan keluarnya Pakto 88 pada tahun 1988 dan keluarnya UU No. 8 Tahun 1992, perbankan di Indonesia tumbuh subur. Puluhan bank baru berdiri. Hal ini disebabkan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendirikan bank begitu sangat mudah, misal dengan modal Rp. 50.000.000,00 setiap orang dapat mendirikan bank perkreditan rakyat. Akibatnya setiap orang latah untuk mendirikan bank baru padahal mereka sebelumnya tidak mengenal bank secara baik.

Awal tahun 1997 – 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank dilikuidasi dan puluhan lagi dimerger akibat terus menerus menderita kerugian, baik bank milik pemerintahan maupun milik swasta nasional. Kebobrokan dunia perbankan Indonesia adalah akibat salah

⁷*Ibid.* Hal. 88

⁸Op Cit. Hal. 90

dalam pengelolaannya. Hancurnya dunia perbankan tersebut merupakan pelajaran berharga bagi para bankir di Indonesia.

Salah kelola bank yang berdampak pada terpuruknya perekonomian nasional tersebut memberikan suatu kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Belum diterapkannya *good corporate governance* disinyalir menjadi faktor utama berkepanjangannya krisis yang terjadi di Indonesia⁹.

Konsep *good corporate governance* sebagai model pengelolaan perusahaan yang bersifat modern diyakini mampu membawa perubahan pengelolaan bank menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan yang diwarnai ketatnya persaingan antarbank dalam merebut kepercayaan nasabah dan pengembangan usaha bank. Meskipun tidak menyebut tentang tata kelola atau *good corporate governance*, pentingnya pengelolaan perbankan secara baik agar bank menjadi industri yang sehat telah diingatkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa "...terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan mampu berfungsi dengan efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Penulis berpendapat bahwa pembinaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana manajemen bank dapat mengelola banknya dengan baik, dan hal ini sama maknanya dengan pentingnya suatu "tata kelola perusahaan yang baik"

Dalam aktivitas bisnis di Indonesia, istilah prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) relatif baru dikenal sejak satu

⁹Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Penerbit Balairung & Co, Yogyakarta. Hal. 16

dekade terakhir, bahkan dalam perundang-undangan tentang badan usaha atau perusahaan, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, istilah *Good Corporate Governance* belum dikenal sama sekali, sedangkan dalam aktivitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat, istilah ini sudah lama dikenal¹⁰.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mulai menjadi perdebatan dan perbincangan hangat sejak terjadi kasus ambruknya perusahaan raksasa dunia, seperti Enron, WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada permulaan abad ke-21, serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an. Sejak kejadian yang sangat fantastis dalam dunia bisnis ini membuka mata semua kalangan pebisnis dan pemerintahan betapa pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnis¹¹.

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis para pakar manajemen dapat disimpulkan penyebab utama tumbangya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mereka, di samping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip *Good Corporate Governance* itu antara lain ditandai oleh empat macam hal, yaitu:

1. lemahnya peranan *the Board of directors* dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan; *Board of directors* kurang aktif dalam menganalisis strategis bisnis perusahaan,
2. semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan utang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan,
3. tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh *Board of directors* kepada pemegang saham dan kreditur,

¹⁰Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta press, Yogyakarta. Hal. 75

¹¹*Ibid.*

4. dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja dibawah pengawas langsung komite audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan.¹²

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan secara baik dengan penerapan konsep *Good Corporate Governance* diyakini akan mampu membawa perusahaan lebih maju dan berkembang. Namun, penerapan konsep *Good Corporate Governance* secara tidak tepat dapat saja menjadi bumerang yang meruntuhkan usaha dan menghancurkan perusahaan. Dengan demikian, diperlukan suatu pemahaman yang benar mengenai konsep *Good Corporate Governance* sehingga dalam penerapannya dapat menjadi sarana bagi pengembangan usaha dan perusahaan.

B. PERMASALAHAN

Sebagaimana disinggung diatas, bahwa pemahaman secara benar mengenai konsep *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk dapat menjadi sarana bagi upaya pengembangan perusahaan, dalam hal ini adalah perbankan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dalam tulisan ini dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dan Bagaimanakah Konsep *Good Corporate Governance* itu?
2. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* Dapat Menjadi Sarana Pengembangan Kelembagaan Perbankan?

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Konsep *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance menurut definisi Hessel Nogi S. Tangkilisan¹³, adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

¹²Ibid. Hal. 86

¹³Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta. Hal. 2

seperti kreditor, suplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Good Corporate Governance menurut definisi yang diberikan Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang, yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Joni Emirzon ada beberapa aspek penting dari *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami beragam kalangan bisnis, yaitu:

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Di antaranya, tanggung jawab pengelolaan perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang

material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).¹⁴ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana disusun *Organization for economic co-operation and development (OECD)* meliputi keadilan (*fairness*), transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Inti dari prinsip keadilan (*fairness*) adalah bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Inti dari prinsip transparansi (*transparancy*) adalah meningkatkan keterbukaan (*discloser*) dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*). Dalam pengambilan keputusan, direksi dan dewan komisaris senantiasa berupaya mengetengahkan keterbukaan kepada para *stakeholders*, dengan lima karakteristik, yaitu *komprehensif, relevan, friendly, reliable, dan comparable*.

Inti dari tanggung jawab (*responsibility*) adalah bahwa selain bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris serta jajarannya juga bertanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada.

Inti dari prinsip akuntabilitas (*accountabilily*) adalah terciptanya sistem pengendalian yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan diantara anggota direksi, pemegang saham, komisaris dan pengawas. Para komisaris, direski dan jajarannya wajib

¹⁴*Op. Cit.* Hal. 95

memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Inti dari prinsip moralitas (*morality*) adalah bahwa manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas (kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu). Sedangkan inti dari prinsip kehandalan (*reability*) adalah bahwa pihak manajemen/pengelola dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan.

Inti dari prinsip komitmen (*commitment*) adalah bahwa pihak pengelola/manajemen dituntut memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan, dan senantiasa mengoptimalkan nilai pemegang saham, serta menurunkan tingkat resiko perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* menurut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 harus berpegang pada tiga prinsip yaitu transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. Demikian pula, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* telah menetapkan *code of good corporate governance* pada Maret 2000 yang beranggotakan Ekuin, BKPM, Meneg BUMN, Menteri Hukum & Perundangan & HAM, Menperindag, Bappenas, Kadin, Perbanas, Akuntan Publik, LSM, notaris & pengacara, memberikan rekomendasi sebagai kode sektorat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap entitas usaha dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, fairness, dan kemandirian.

Pemahaman mengenai konsep *Good Corporate Governance* dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana diuraikan di atas, pada akhirnya harus diletakkan pada tujuan dari penerapan konsep *Good Corporate Governance* itu sendiri, yaitu:

- a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
- b. melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham,
- c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,

- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.¹⁵

Penerapan *Good Corporate Governance* yang merupakan kultur baru dalam lingkungan bisnis bukanlah persoalan yang sederhana terutama jika kultur yang ada tidak pernah mengindahkan atau memelihara “kepekaan” unsur-unsur etik bisnis. Oleh karenanya, menurut Paripurna P. Sugarda menjadi suatu persoalan tersendiri apakah *Good Corporate Governance* harus merupakan persyaratan hukum ataukah cukup dituangkan dalam etika bisnis perusahaan?¹⁶

2. Pengembangan Kelembagaan Perbankan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi kalangan industri perbankan merupakan suatu kebutuhan. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan tersebut. *Pertama*, situasi eksternal dan internal perbankan dalam perkembangannya sangat kompleks, yang mana resiko kegiatan perbankan pun semakin beragam. Kondisi demikian menuntut pengelolaan perbankan secara baik, baik terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri (*corporate manajemen*) maupun pengelolaan resiko (*risk manajemen*). Pengelolaan perusahaan dan pengelolaan resiko dapat disatupadukan (diintegrasikan) melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kedua, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga berkaitan dengan persoalan persaingan antar bank. Dalam dinamika persaingan usaha yang semakin kompetitif, tidak terhindarkan bahwa

¹⁵*Op. Cit*, Hal. 111

¹⁶Paripurna P. Sugarda, 2001, *Good Corporate Governance, Etika Bisnis dan Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus No. 39/X/2001. Hal. 123

setiap usaha harus mampu menata usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan daya tawar dan daya saing. Dalam hal ini, pengelolaan perbankan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan yang tak terelakkan.

Ketiga, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi industri perbankan, mengutip pendapat Indra Surya dan Ivan Yustiavandana¹⁷ (2006: 116) merupakan suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).

Upaya pengembangan perbankan menjadi suatu industri yang besar dan mampu memainkan peran strategis sebagaimana diharapkan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya akan tercapai bilamana industri perbankan dapat mengelola manajemen risiko dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Manajemen* untuk mencegah terjadinya kemunduran usaha yang dapat berimbas pada penutupan bank.

Menurut penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perauran perundang undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar

1. Tranparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

¹⁷Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Penerbit Kencana kerjasama dengan LKPMK FH UI, Jakarta. Hal. 65

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggungjawaban(responsibility) yaitu kesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kestaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*

Dalam konteks membahas manajemen risiko dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi industri perbankan, terlebih dahulu dicermati beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang relevan, salah satunya adalah PBI Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank untuk menyusun rencana bisnisnya secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat

Bank Indonesia mensinyalir bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern bank, diantaranya:

- (1) kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas pengurus bank, dan gagalnya pengembangan budaya pengendalian intern;
- (2) kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional bank;

- (3) kurang lancarnya komunikasi dan informasi bagi pengambil keputusan;
- (4) kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya;
- (5) kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan, kebijakan, dan prosedur bank¹⁸.

Apabila identifikasi masalah yang disinyalir Bank Indonesia sebagai penyebab kesulitan usaha bank, secara umum dapat disebutkan bahwa keseluruhan permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pelaksanaan manajemen bank. Kunci utama mengatasi masalah tersebut adalah dengan pengendalian internal.

Terkait dengan masalah ini, Bank Indonesia menetapkan lima elemen penting yang harus diperhatikan dalam melakukan perbaikan sistem pengendalian intern, yaitu:

- (1) pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
- (2) identifikasi dan penilaian risiko;
- (3) kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
- (4) sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi;
- (5) kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Berbagai permasalahan yang terjadi pada bank umum yang secara potensial menghambat usaha bank itu sendiri juga dapat disebabkan “keterlibatan” bank dalam praktik-praktik yang berbau korupsi, seperti praktik pencucian uang. Made Sadguna mengungkapkan bahwa hancurnya sektor keuangan Indonesia dalam masa tujuh tahun berkubang dalam krisis

¹⁸Jimmy E. Elias, *Peranan Manajemen Risiko Strategik Dalam Mendukung Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23, No. 3 - Tahun 2004

ekonomi yang parah terutama disebabkan oleh faktor korupsi. Kasus-kasus BLBI merupakan bukti nyata dan tak terbantahkan¹⁹.

Lebih lanjut dijelaskan Made Sadguna, bahwa maraknya korupsi di sektor keuangan disebabkan oleh beberapa faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi antara lain berupa rendahnya kualitas manajemen dibarengi oleh lemahnya praktik tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Adapun faktor eksternal adalah berupa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang lemah memberi peluang besar bagi petualang-petualang/koruptor dan penjahat perbankan untuk membobol bank yang menyimpan dana milik masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan pembenahan intern perbankan sebagai bagian dari upaya pengembangan industri perbankan, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini akan memberikan landasan yang kokoh bagi praktik-praktik usaha yang hati-hati dan profesional. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memungkinkan terjadinya *self regulatory* yang mengendalikan perilaku manajemen dan semua karyawan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi.

Made Sadguna menjelaskan bahwa profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi yang merupakan elemen utama *Good Corporate Governance* akan menjadi hambatan besar bagi koruptor dan penjahat lainnya untuk memasuki sistem keuangan. Apabila mereka menemukan jalan masuk, kehadirannya akan segera terdeteksi sehingga memungkinkan proses hukum mulai bekerja. Ini berarti *Good Corporate Governance* akan memberikan efek preventif sekaligus mempermudah penerapan penegakan hukum yang bersifat refresif.

¹⁹I Gde Made Sadguna, *Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporate Governance Sektor Keuangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 – No. 3 – Tahun 2005

Permasalahannya, sebagaimana diungkapkan Tangkilisan, bahwa dalam lingkungan perbankan nasional praktik *Good Corporate Governance* belum melembaga secara utuh. *Good Corporate Governance* mencakup mekanisme administrasi untuk memuluskan hubungan antarmanajemen, pemegang saham, dan kelompok kepentingan (*stakeholder*). Persoalan inti yang menjadi penunjang keberhasilan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terletak pada tuntutan menjalankan fungsi-fungsi akuntabilitas, *disclosure*, *fairness*, transparansi, dan tanggung jawab.

Dengan demikian jelas, bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga perbankan akan menjadikan pengelolaan bisnis perbankan menjadi lebih terbuka, dengan berperannya seluruh fungsi dan unsur yang terlibat dan terkait secara maksimal, efektif dan efisien sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* semakin menguatkan struktur kelembagaan sehingga mampu meningkatkan kinerja kelembagaan dan dapat bersaing dalam iklim bisnis yang semakin kompetitif.

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari ketaatan pengelolaan usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh atauran hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia, serta aturan hukum internal perbankan.

Dengan berfungsinya seluruh instrumen utama, instrumen penunjang dan instrumen pendukung dari suatu industri perbankan, maka segala kebijakan internal termasuk rencana pengembangan bisnis perbankan yang sedang dan akan dilaksanakan dapat diimplementasikan sebagaimana direncanakan.

D. PENUTUP

Keterpurukan sektor perbankan dalam masa krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sekitar tahun 1997-1998 membuka kesadaran tentang pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*) suatu institusi atau usaha. Penerapan *good governance* di sektor dunia usaha dikenal dengan nama *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik).

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pembenahan intern perbankan diyakini akan memberikan landasan yang kokoh bagi praktik-praktik usaha yang hati-hati dan profesional. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memungkinkan terjadinya *self regulatory* yang mengendalikan perilaku manajemen dan semua karyawan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat menjadi dasar bagi pengembangan usaha dan kelembagaan, terutama dalam kaitannya dengan memperoleh dan mempertahankan kepercayaan publik, yang merupakan modal dasar bagi usaha perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi, 2005, **Aspek Hukum Internet Banking**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, **Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance**, Penerbit Balairung & Co, Yogyakarta.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, **Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha**, Penerbit Kencana kerjasama dengan LKPMK FH UI, Jakarta.
- Jimmy E. Elias, 2004, **Peranan Manajemen Risiko Strategik Dalam Mendukung Good Corporate Governance**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23, No. 3 - Tahun 2004.
- Johan Pieris dan Nizam Jim, 2007, **Etika Bisnis & Good Corporate Governance**, Penerbit Pelangi Cendikia kerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2007, **Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia**, Genta press, Yogyakarta.
- Kasmir, 1999, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, (edisi baru), Rajawali Pers, Jakarta.
- I Gde Made Sadguna, 2005, **Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporate Governance Sektor Keuangan**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 – No. 3 – Tahun 2005.
- Paripurna P. Sugarda, 2001, **Good Corporate Governance, Etika Bisnis dan Hukum**, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus No. 39/X/2001.
- , 2001, **Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Apakah Hanya Etika Bisnis Atau Juga Persyaratan Hukum?**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001.
- Rudjito, 2004, **Kegunaan Penerapan Risk Manajemen Untuk Perbankan**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23, No. 3 - Tahun 2004
- Wibowo, 2006, **Manajemen Perubahan**, Rajawali Pers, Jakarta.